

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DIY: Eksplorasi Data Susenas

Penulis Buku :

Surpiko Hapsoro Darpito, SE, M.Si

Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si

Dr. Sultan, S.E., M.Si

Gita Astyka Rahmanda, S.E., M.Si



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
UPN “Veteran” Yogyakarta

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DIY: Eksplorasi Data Susenas

Penulis :

Surpiko Hapsoro Darpito, SE, M.Si

Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si

Dr. Sultan, S.E., M.Si

Gita Astyka Rahmanda, S.E., M.Si

© Copyright

Surpiko Hapsoro Darpito, Didi Nuryadin

Sultan, Gita Astyka Rahmanda

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis, maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpangan lainnya, tanpa izin tertulis dan Penulis

Cetakan Pertama, 2023

ISBN : 978-623-389-274-2

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

UPN "Veteran Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur. Yogyakarta, 55283

Telp. (0274) 486188. 486733, Fax (0274) 486400

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan penyusunan buku Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di DIY : Eksplorasi Data Susenas telah selesai dilaksanakan.

Buku ini disusun dalam rangka membantu kalangan akademik dan instansi pemerintah untuk memahami bahasan terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di DIY. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan fenomena sosial ekonomi yang biasanya terjadi pada negara berkembang salah satunya Indonesia. Buku ini membahas tentang kondisi kemiskinan dan ketimpangan rumah tangga di DIY, mulai dari perkembangan kondisi kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan hingga kebijakan pengentasan kemiskinan. Sehingga, buku ini dapat menjadi alternatif pegangan bagi mahasiswa, dosen dan instansi pemerintah untuk memahami secara mendalam mengenai kondisi kemiskinan dan ketimpangan di DIY.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Kekurangan yang ada akan menjadi cambuk untuk melaksanakan perbaikan dalam penulisan buku referensi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Oktober 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN TEORI	5
Kemiskinan	5
Kondisi Kemiskinan DIY	10
Perkembangan Kondisi Kemiskinan DIY	18
BAB III KETIMPANGAN PENDAPATAN	23
Ketimpangan Rumah Tangga	23
BAB IV KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA	31
Konsumsi Rumah Tangga	35
Pengeluaran Kesehatan Rumah Tangga	41
Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga	43

BAB V	PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN DAN PERUMAHAN	45
	Pendidikan	45
	Ketenagakerjaan	50
	Perumahan	53
BAB VI	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	57
	Aspek Keuangan dan Perbankan	57
	Program Bantuan Pemerintah	63
BAB VII		69
PENUTUP		69
DAFTAR PUSTAKA		73

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu fenomena kompleks yang terjadi pada negara dunia ketiga. Hal ini diimplikasikan oleh sebuah kondisi dari ketidakmampuan sebuah komunitas atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan primer. Intensitas kemiskinan berkorelasi dengan sejauh mana kesenjangan pendapatan mengurangi standar hidup (Febriantikaningrum et al., (2017); Novianti and Panjaitan, (2022); Yang and Qiu, (2016)). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menghadapi masalah tersebut. Efek domino yang disebabkan pada kondisi tersebut merupakan awal mula dari permasalahan multidimensi atau *spillover effect* tingkat nasional. Studi oleh Auwalin (2009) dan Maurilla et al. (2023) menemukan bahwa bertambahnya angka kemiskinan baru dipengaruhi oleh percepatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan ketimpangan pendapatan.

Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi angka kemiskinan (Nation, 2015).

Agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan menjadi bentuk pengentasan kemiskinan ekstrem diseluruh negara. Menurut Dewi & Rachmawatie (2020), pemerintah daerah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan dengan mengidentifikasi rumah tangga yang termasuk pada golongan miskin, sehingga dapat dengan mudah melakukan pelacakan (*tracing*) akses pelayanan sosial yang tepat sasaran. Studi oleh Yuliani et al. (2021) menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa akses pendidikan yang luas kepada rumah tangga miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks bahkan memiliki perspektif multidimensi. Hal ini mengacu pada sebuah perilaku individu atau rumah tangga dalam hal ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pelayanan infrastruktur publik, dan kerentanan kesehatan (Wratten, 1995; Jahan dan Umana, 2003; Roitman, 2019). Guna memahami kerangka konseptual kemiskinan sebagai fenomena multidimensional perlu dilihat lebih dalam mengenai *leading indicator* sebuah rumah tangga dapat dikatakan sebagai miskin. Salah satu aspek utama dalam menganalisis kemiskinan adalah dampak yang

diakibatkan dari adanya ketimpangan pendapatan antar rumah tangga.

Kemiskinan perlu mendefinisikan siapa yang pantas disebut sebagai rumah tangga miskin dan tidak miskin. Menurut Haughton dan Khandker (2009) mendefinisikan kemiskinan sebagai "kurangnya kesejahteraan yang mendalam." Menurut pandangan konvensional, kesejahteraan pada dasarnya terkait dengan kontrol atas komoditas, oleh karena itu orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki cukup pendapatan atau konsumsi untuk membawa mereka melampaui ambang batas minimum yang sesuai. Dengan demikian pendekatan ini melihat kemiskinan sebagian besar dalam aspek moneter.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu dari banyaknya provinsi dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan persentase tingkat kemiskinan pada Maret 2021, dapat diidentifikasi bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dan Kota Yogyakarta memiliki angka persentase kemiskinan terendah. Menurut Berita Resmi Statistik BPS DIY, (2023) katalisator peningkatan jumlah penduduk miskin diakibatkan oleh tingginya angka persebaran Covid-9.

Ketimpangan merupakan suatu fenomena ekonomi, dimana terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan dan kesempatan rumah tangga suatu daerah. Tingkat

ketimpangan di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semula 0,423 pada tahun 2021 menjadi 0,439 pada tahun 2022, dan rasio gini tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,441. Ketimpangan DIY masih berada pada *level* sedang.

Pemerintah DIY sangat fokus terhadap masalah kemiskinan. Hal ini terlihat melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda diantaranya mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah (DIY) dalam mengupayakan tepenuhinya hak penduduk miskin. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 sejalan dengan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pertama mengenai pengentasan kemiskinan (Un-Habitat, 2013). Studi terkait pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di DIY antara lain dilakukan oleh penelitian terdahulu (Hill, 2021; Mashuri et al., 2022; Purwono et al., 2021; Sugiharti et al., 2022).

Buku ini berusaha memberikan gambaran mengenai kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Dengan menggunakan data Susenas 2022, akan dianalisis model karakteristik sosio ekonomi rumah tangga terhadap angka garis kemiskinan. Lebih lanjut, juga dibahas mengenai analisis kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di DIY.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah suatu hal kompleks yang melampaui sekadar kurangnya pendapatan (Nafziger, 2006). Masalah ini seringkali ditandai dengan keadaan tidak berdaya, kekurangan kemampuan dasar, hak, dan kebebasan yang memberikan individu pilihan dan peluang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekayaan atau harta benda yang cukup, serta kurangnya kesejahteraan. Definisi kemiskinan bervariasi dari satu negara atau organisasi ke negara atau organisasi lainnya. Namun pada umumnya, kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan sosial dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Kemiskinan absolut, yang berbeda dengan kesenjangan pendapatan, merujuk pada kondisi hidup dengan pendapatan yang kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Di negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, Kenya, Tanzania, dan Maroko, terdapat kebutuhan tambahan yang harus dipertimbangkan. Membuat perbandingan antara negara-negara ini sangat sulit karena penentuan tingkat kemiskinan ini adalah proses yang subjektif. Selain itu, definisi kemiskinan bervariasi berdasarkan waktu dan lokasi geografis serta standar hidup di setiap daerah. Meskipun garis kemiskinan nasional selalu berada di bawah rata-rata konsumsi secara umum (Martin Ravallion et al., 1991), mereka menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata meningkat seiring dengan peningkatan garis kemiskinan.

Studi oleh Deepa Narayan et al. (2000) didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dan sampel yang mewakili 60.000 masyarakat miskin dari 60 negara berkembang selama tahun 1990-an, dengan pertanyaan utama yakni bagaimana pandangan dan prioritas masyarakat miskin terkait kemiskinan dan kesejahteraan. Masyarakat miskin melihat bahwa kemiskinan memiliki banyak dimensi yang saling terkait. Ada enam dimensi utama dalam definisi kemiskinan menurut penelitian.

Pertama, kemiskinan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, tidak hanya satu faktor saja yang menyebabkan kemiskinan. Namun, intinya adalah bahwa mereka selalu menghadapi masalah kelaparan dan kekurangan pangan.

Kedua, aspek psikologis juga sangat penting dalam kemiskinan, seperti perasaan tidak berdaya, ketidakberdayaan untuk bersuara, ketergantungan, rasa malu, serta penghinaan. Mereka tetap mempertahankan identitas budaya mereka dan solidaritas sosial meskipun kondisi sulit yang mereka hadapi tidak manusiawi. Ketiga, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan (terutama di daerah pedesaan), transportasi, dan air bersih sangat terbatas bagi masyarakat miskin ini. Keempat, pendidikan jarang mendapat perhatian atau peninjauan yang cukup meskipun kebutuhan literasi sangat penting. Orang miskin menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan, tetapi hanya jika ada dukungan ekonomi yang memadai dalam masyarakat secara umum dan kualitas pendidikan meningkat. Kelima, masalah kesehatan yang buruk dan penyakit menjadi sumber masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin hampir di mana-mana. Hal tersebut berkaitan dengan pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan juga potensi kehilangan pendapatan akibat sakit. Keenam, orang miskin dinilai kurang memperhatikan pendapatan

dan milih fokus pada pengelolaan aset fisik, manusia, sosial dan lingkungan dalam mengatasi kerentanannya. Mayoritas kerentanan yang terjadi di berbagai daerah mempunyai dimensi gender.

Daniele (2021) mengemukakan berdasarkan sudut pandang lainnya kemiskinan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan latar belakang budaya. Secara fundamental status sosial disini meliputi pendidikan, pendapatan, keamanan finansial, pekerjaan, serta kondisi standar hidup masyarakat. Menurut Xue et al. (2020) individu dengan status ekonomi sosial yang rendah dipengaruhi oleh ketidakmampuan rumah tangga dalam mengakses fasilitas pendidikan. Akibatnya, setiap individu yang tidak dapat menjangkau pendidikan yang baik tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu sarana paling dasar dalam mengentaskan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung (Rios et al., 2013).

Akibat dari faktor psikologis telah berkembang pemahaman baru mengenai konsep kemiskinan, dimana pada kondisi tertentu sebuah individu memiliki rasa kenyamanan untuk tetap berada di zona kemiskinan dengan asumsi dipelihara oleh negara melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Henry

(2022) dimana kebijakan intensif fiskal dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada umumnya berjalan tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Hal ini diakibatkan oleh tingginya ketergantungan rumah tangga penerima bantuan. Temuan ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hoyt et al. (2023) bahwa mentalitas kemiskinan akan menyebabkan *deadweight loss* atau ketidakseimbangan alokasi anggaran pemerintah.

Kemiskinan masih menjadi masalah di negara berkembang dan maju, salah satunya disebabkan karena kebiasaan masyarakat miskin. Kondisi miskin dan banyaknya anak-anak membuat mereka mengalami kekurangan makanan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan (Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, 2016). Kemiskinan dalam pengertian tradisional terutama mengacu pada kemiskinan pendapatan, yang berarti bahwa individu atau keluarga jatuh miskin ketika pendapatan mereka pendapatan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka Liu et al. (2023).

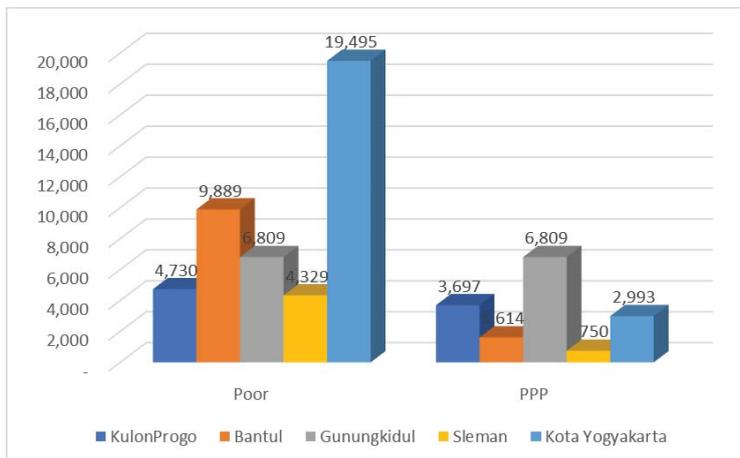
Mempertegas temuan Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, (2016) masyarakat miskin biasanya menghabiskan sebagian besar uang mereka bukan untuk membeli makanan. Hal yang mengejutkan, pengeluaran masyarakat miskin untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting juga memiliki jumlah yang signifikan,

seperti untuk tembakau, alkohol, dan festival/kenduri. Konsumsi rokok berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan Lubis et al., (2022); Yunita, (2018). Seperti yang terdapat dalam buku karya Todaro, M., P & Stephen, C., (2012).

Kondisi Kemiskinan DIY

Kemiskinan biasanya ditandai dengan rendahnya gizi, kurangnya sanitasi, tempat tinggal, akses ke layanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Data BPS menunjukkan DIY menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa, dengan angka kemiskinan di 11,49% pada tahun 2022. Kemiskinan berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan, meskipun kedua hal tersebut berbeda. Ketimpangan mengamati tentang bagaimana hal-hal seperti pendapatan dan konsumsi tersebar di seluruh populasi. Jika diyakini bahwa kesejahteraan individu bergantung pada posisi ekonomi mereka dalam kaitannya dengan orang lain dalam masyarakat, maka analisis ketidakesetaraan diperlukan dalam konteks kemiskinan. Menjadi rentan berarti berisiko kemiskinan di masa depan, bahkan jika seseorang saat ini tidak miskin. Kerentanan sering dikaitkan dengan efek "*shock*" seperti kekeringan, penurunan harga pertanian, atau krisis keuangan. Oleh karena itu mempengaruhi keputusan investasi, kebiasaan

produksi, mekanisme *coping strategy* (upaya mengontrol suatu konflik), dan bagaimana mereka melihat situasi mereka sendiri, sehingga kerentanan adalah komponen penting dari kesejahteraan (Haughton and Khandker, 2009).

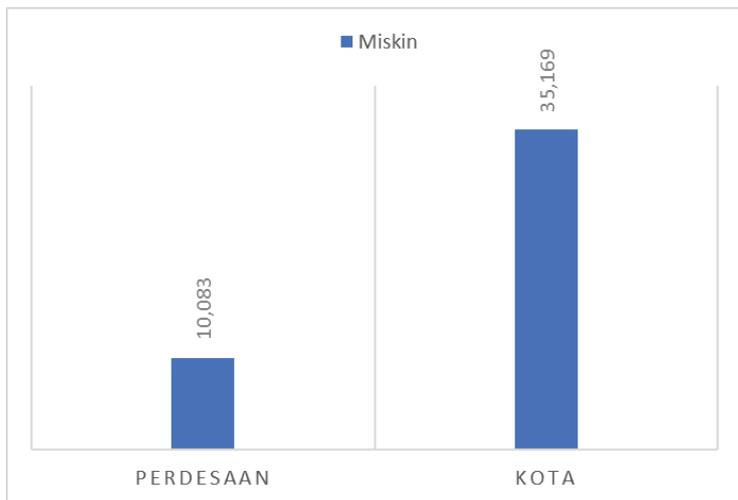


Sumber: SUSENAS, 2002

Gambar 2.1 Sebaran Rumah Tangga Miskin per Kabupaten Kota

Berdasarkan garis kemiskinan (*headcount index of poverty*), Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi di provinsi DIY, yakni sebesar 19.495 rumah tangga miskin.. Hilangnya kecukupan penduduk akan kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai tanda kemiskinan

ekstrim pada daerah tersebut. Studi oleh Khan et al. (2022) menemukan bahwa kemiskinan ekstrim yang bersamaan dengan pertumbuhan penduduk akan memperburuk pembangunan khususnya dalam hal kapasitas penyerapan dan kualitas lingkungan. Berdasarkan persebarannya, Gunungkidul menduduki posisi teratas sebagai wilayah dengan rumah tangga miskin ekstrim tertinggi yang mencapai 6.809 rumah tangga.

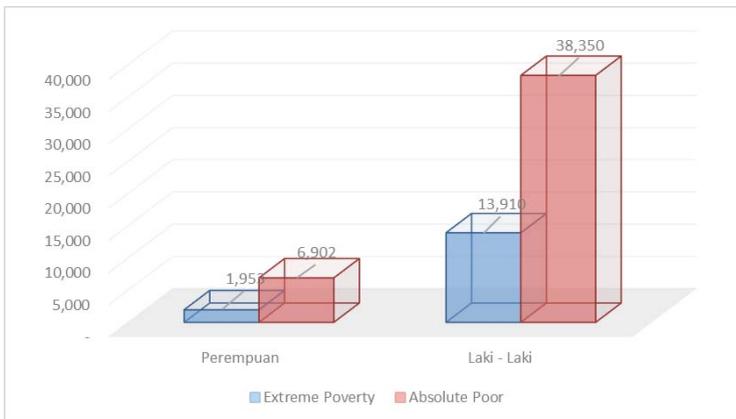


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 2.2 Rumah Tangga dibawah Garis Kemiskinan berdasarkan Tempat Tinggal DIY 2022

Keberadaan rumah tangga miskin berdasarkan kategori wilayah dapat dibedakan menjadi pedesaan dan

kota. Sebagian besar rumah tangga miskin di provinsi DIY tahun 2022 berada di wilayah perkotaan. Urbanisasi dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya rumah tangga miskin kota. Keterbatasan akses khususnya penyerapan tenaga kerja menimbulkan rumah tangga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebanyak 35.169 penduduk miskin berada di perkotaan DIY sedangkan di perdesaan terdapat 10.083 rumah tangga miskin.



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 2.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Gender DIY tahun 2022

Kemiskinan dapat diukur melalui dua ukuran yakni kemiskinan absolut dan ekstrim. Kemiskinan absolut diukur dari total pendapatan individu sedangkan

kemiskinan ekstrim diukur berdasarkan pemenuhan biaya hidup sehari-hari. Hasil estimasi pengukuran kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat 13.910 rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki mengalami kemiskinan ekstrim, sedangkan 38.350 berada pada kemiskinan absolut. Sejumlah 1.953 rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan mengalami kemiskinan ekstrim dan kemiskinan absolut dialami sebesar 6.902 rumah tangga.

Tingkat kemiskinan yang dialami oleh tiap individu dapat didasarkan pada gender atau jenis kelamin. Kemiskinan dan gender merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Berbagai studi menemukan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga Perempuan berpeluang lebih miskin dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki (SMERU, 2005). Namun, di DIY tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrim dan absolut justru didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan penduduk.

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan, DIY Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2022

Kabupaten/Kota	P0	P1	P2
Kulonprogo	0,04133	0,0058	0,00112
Bantul	0,03379	0,00339	0,00064
Gunungkidul	0,03425	0,0046	0,00079
Sleman	0,01224	0,00136	0,00025
Kota Yogyakarta	0,13957	0,03627	0,01206

Sumber: SUSENAS, 2022

Berdasarkan tingkat pengeluarannya, tingkat kemiskinan rumah tangga di DIY paling tinggi adalah di Kota Yogyakarta sebesar 0,139 artinya terdapat lebih dari 13% rumah tangga yang masuk klasifikasi miskin dari total populasi rumah tangga. Adapun Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan sebesar 4 %. Kolom P2 merupakan indikator kemiskinan dimana tingkat kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kedalamannya. Maksud dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dapat diukur berdasarkan *gap* atau rata-rata pengeluaran pada tiap kelompok rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan tersebut.

Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan, DIY Berdasarkan Pendapatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	P0	P1	P2
Kulonprogo	16,39	2,32	0,56
Bantul	12,27	2,11	0,5
Gunungkidul	15,86	2,63	0,67
Sleman	7,74	1,18	0,27
Kota Yogyakarta	6,62	0,8	0,13

Menurut pendapatannya, tingkat kemiskinan DIY dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Berdasarkan indikator P0, Kulonprogo menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi per kabupaten di DIY sebesar 16,39. Kemudian, posisi kedua diduduki oleh Gunungkidul sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY sebesar 15,86. Disamping itu, Gunungkidul memiliki nilai P1 dan P2 tertinggi dibandingkan daerah lainnya sebesar 2,32 dan 0,67. Artinya, kondisi kemiskinan di Gunungkidul perlu memperoleh perhatian lebih oleh Pemerintah pada sisi pendapatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.



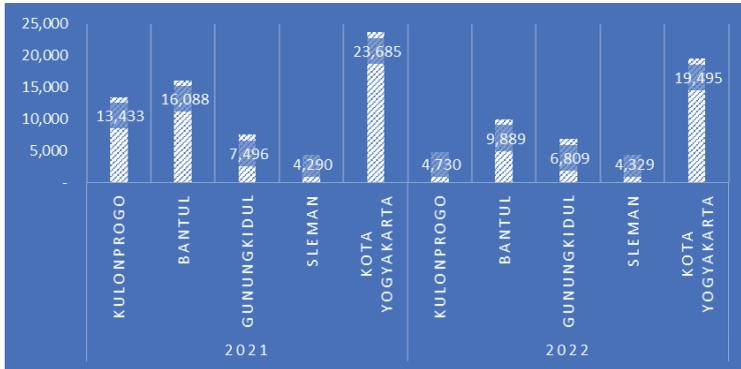
Gambar 2.4 Kondisi Permukiman Kali Code Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kemiskinan menggunakan data SUSENAS, temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Roitman (2019) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa komunitas rumah tangga yang bertempat tinggal di kawasan perkotaan sepanjang sempadan sungai Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan untuk terjatuh ke zona kemiskinan. Hal ini dinilai dari perbedaan taraf hidup, tingkat pengeluaran, sanitasi rumah tangga, kondisi perumahan, tingkat pendidikan, serta konsumsi kalori per kapita per bulan.

Berbeda halnya dengan studi yang dilakukan oleh Muthia and Isbah (2022) yang mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan tidak selamanya memberikan dampak negatif terhadap suatu kebahagiaan. Melihat dari sisi sosiologis dan budayanya, rumah tangga di DIY tidak dapat menjelaskan mengenai kondisi yang diterima saat ini dengan pemenuhan keinginan (*desire*). Dapat diartikan, kondisi rumah tangga di provinsi ini secara terbuka menerima adanya perubahan atau peningkatan taraf hidup (*living standard*), namun jika hal tersebut tidak dapat dicapai maka masyarakat lebih memilih untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dan kehidupan gotong royong dalam segala aspek.

Perkembangan Kondisi Kemiskinan DIY

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi pada berbagai wilayah di negara berkembang termasuk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang mengalami masalah kemiskinan (Findi et al., 2010). Sektor pangan menjadi penyumbang utama kemiskinan dibandingkan dengan sektor lainnya (Saragih, 2015). Kemudian, rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab tingginya kemiskinan. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh warga menutup kesempatan mereka dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang layak.

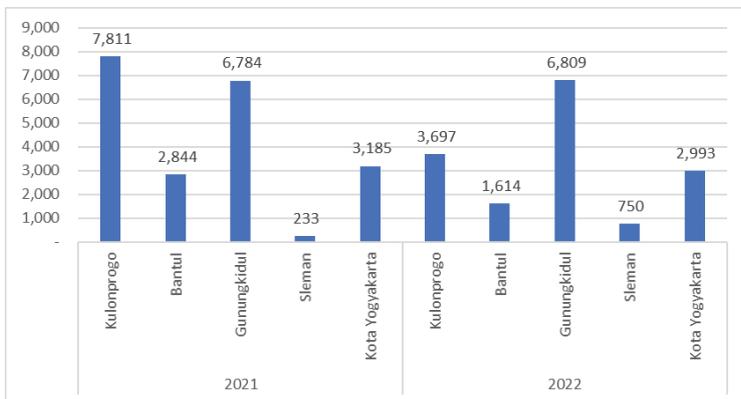


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 2.5 Perbandingan Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2022

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2021 dan 2022, tingkat kemiskinan yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan data perkembangan kondisi kemiskinan DIY, Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi selama tahun 2021 hingga 2022. BPS (2023) menyatakan bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan angka kemiskinan menjadi sebesar 7,69 persen dan menjadi daerah dengan garis kemiskinan tertinggi se-provinsi DIY yaitu Rp 556.674,00 perbulan. Nilai garis kemiskinan tersebut menggambarkan pengeluaran perkapita yang harus dibelanjakan penduduk sehingga penduduk

dengan rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin. Secara umum, terdapat lebih dari 4000 penduduk miskin yang berada di Kabupaten/Kota DIY selama tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, sebanyak 23.685 penduduk miskin bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dan telah mengalami penurunan menjadi 19.495 penduduk miskin di tahun 2022.



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 2.6 Perbandingan Extreme Poverty per Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 – 2022

Menurut data SUSENAS dapat dilihat kemiskinan berdasarkan tingkat pengeluarannya. Kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 mencapai 2,04 persen.

Kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang semakin memburuk. Pada konteksnya di DIY, terdapat perbedaan angka kemiskinan ekstrim antar Kabupaten/Kota. Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan kedua wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya selama tahun 2021 hingga 2022. Pemerintah memegang peranan penting dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim. Pemerintah DIY telah menerapkan kebijakan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menciptakan berbagai program dengan tujuan mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim. Data kemiskinan ekstrim DIY tahun 2021-2022 menunjukkan kondisi penurunan angka kemiskinan ekstrim pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota DIY.

BAB III

KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan Rumah Tangga

Ketimpangan rumah tangga merupakan suatu kondisi yang menggambarkan terjadinya sebuah perbedaan sebaran pendapatan antar rumah tangga yang satu dengan lainnya. Secara umum, seluruh dunia mengidentifikasi kondisi ini dengan istilah ketimpangan (*inequality*) (Matlin & Walmsley, 2010; Sugiyarto et al., 2016). Kondisi ketimpangan erat kaitannya dengan fenomena kemiskinan, namun kedua hal tersebut berbeda secara normatif maupun secara sosiologis. Ketimpangan pada umumnya terjadi pada aktivitas ekonomi suatu daerah. Ketimpangan rumah tangga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Semakin rendah ketimpangan pendapatan pada suatu daerah menandakan pendapatan antar rumah tangga tersebar secara merata. Permasalahan ketimpangan menjadi fokus perhatian bersama karena

dampak yang ditimbulkan mampu memperburuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya ketimpangan pada suatu daerah disebabkan oleh berbagai kondisi yang mencerminkan perbedaan pendapatan antar rumah tangga. Ketidakmerataan persebaran pendapatan menjadi salah satu tantangan dalam membangun perekonomian. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diatasi dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam perekonomian dapat melakukan kebijakan yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan untuk memacu pembangunan ekonomi daerah.

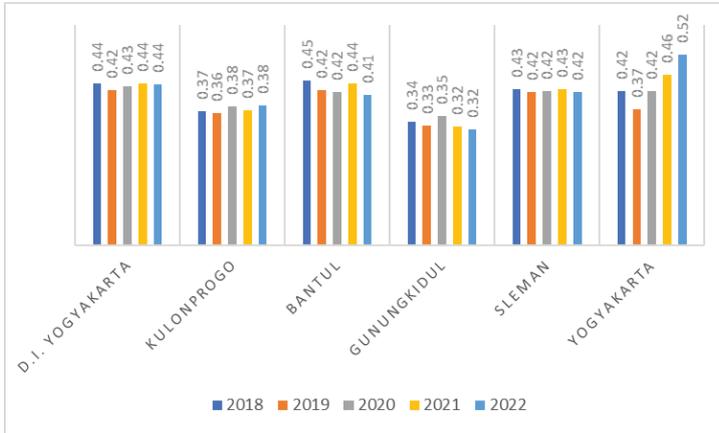
Ketimpangan secara konseptual terbagi menjadi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan non-pendapatan. Ketimpangan pendapatan fokus pada ukuran pendapatan. Disisi lain, ketimpangan non-pendapatan atau disebut sebagai ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*) memiliki ukuran multidimensi seperti kesempatan masyarakat dalam menerima pendidikan, kesehatan dan lainnya. Terjadinya ketimpangan kesempatan pada akhirnya berakibat pada ketimpangan pendapatan. Wibowo (2017) menjelaskan pada kondisi tersebut bahwa setiap rumah tangga yang mengalami kesenjangan kesempatan dalam pendidikan

dan kesehatan akan terkendala saat masuk ke pasar tenaga kerja sehingga berakibat pada timbulnya kesenjangan pendapatan.

Menurut Bazillier et al. (2021) ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan utang rumah tangga Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan kenaikan ketimpangan rumah tangga terbesar yang juga mengalami peningkatan terbesar pada utang rumah tangganya. Sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki cukup pendapatan cenderung mengambil utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan utang yang dilakukan secara tidak produktif akan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan yang berakibat pada meningkatnya ketimpangan. Dalam hal ini upaya inklusi keuangan menjadi alternatif solusi agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dan terjangkau dengan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai daerah mengalami terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi (Adisasmita, 2013). Fenomena ketidaksamaan pertumbuhan ekonomi antar daerah biasa dikenal sebagai ketimpangan. Kondisi ketimpangan banyak terjadi pada negara yang masih berkembang salah satunya Indonesia. Terjadinya ketimpangan antarwilayah memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini menjadi aspek yang

mempunyai impikasi juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah (Sjafrizal, 2008).



Sumber: BPS DIY (2022)

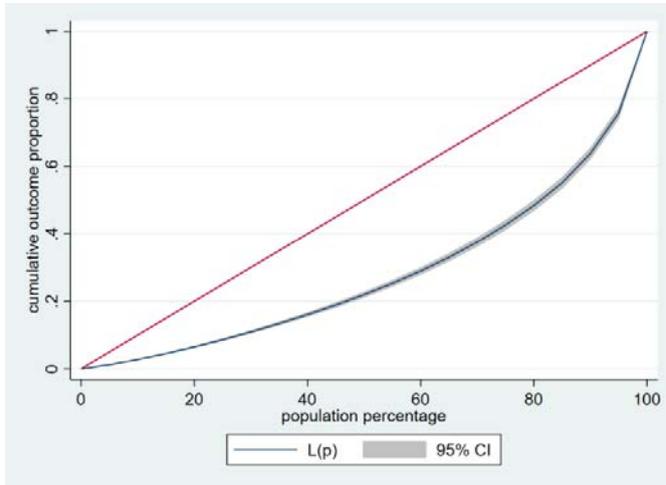
Gambar 3.1 Gini Rasio Provinsi DIY tahun 2018-2022

Ketimpangan pendapatan di kabupaten Provinsi DIY yang diukur melalui gini ratio menunjukkan nilai yang berkisar antara 0,3-0,4. Artinya, ketimpangan pendapatan pada wilayah ini berada pada tingkat ketimpangan sedang. Ketimpangan ini bergerak secara stabil sejak tahun 2018-2022. Kota Yogyakarta mengalami lonjakan ketimpangan yang berbeda jauh dengan kabupaten lainnya dengan gini rasio sebesar 0,52 pada tahun 2022. Terjadinya peningkatan rasio gini menandakan bahwa semakin membengkaknya kesenjangan pendapatan yang berdampak pada kemiskinan (Saleh, 2002).

Selain menggunakan aspek pendapatan, ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat juga dapat dinilai melalui aspek pengeluaran. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mampu mengidentifikasi rata-rata pengeluaran tiap rumah tangga. Pengukuran ketimpangan berdasarkan proksi pengeluaran mampu mengukur seberapa jauh kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga. Menurut SMERU (2016) ketimpangan pengeluaran memberikan pengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, setiap negara perlu memperhatikan kebijakan yang tepat terhadap persoalan ketimpangan.

Kondisi Ketimpangan DIY

Pengukuran dengan menggunakan Kurva Lorenz dapat menampilkan perbandingan antara persebaran pendapatan yang sebenarnya dengan persebaran pendapatan yang merata. Kurva Lorenz mampu mengukur kesenjangan pendapatan yang ditampilkan secara visual dan matematis. Pengukuran kurva Lorenz didasarkan pada rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dengan kurva Lorenz. Tingginya kesenjangan digambarkan dengan semakin jauhnya jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (Heryanah, 2017).



Kabupaten/Kota	Gini Indeks
Kulonprogo	0,39
Bantul	0,43
Gunungkidul	0,34
Sleman	0,42
Kota Yogyakarta	0,52

Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 3.2 Kurva Lorentz Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022

Proyeksi Kurva Lorenz pada gambar 3.2 menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penyimpangan yang signifikan terhadap garis diagonal sehingga dapat diartikan provinsi DIY mengalami ketimpangan pendapatan yang

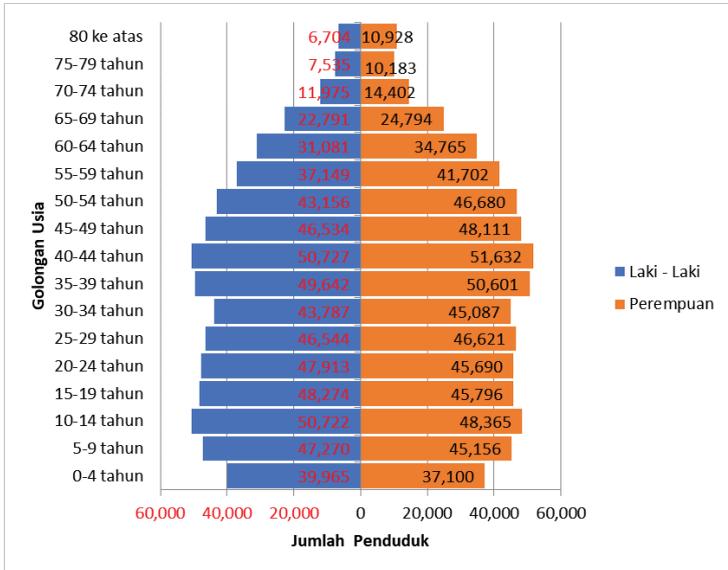
tinggi. Terjadinya kondisi tersebut berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi penduduk berpendapatan rendah. Disisi lain, penduduk berpendapatan tinggi mampu memperoleh seluruh fasilitas yang lebih baik. Ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi merugikan daerah secara berkelanjutan.

BAB IV

KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Demografi

Analisis kependudukan merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dan golongan usia. Salah satu metode untuk menentukan persebaran ini adalah menggunakan piramida penduduk untuk melihat pola yang dihasilkan dari grafik tersebut.



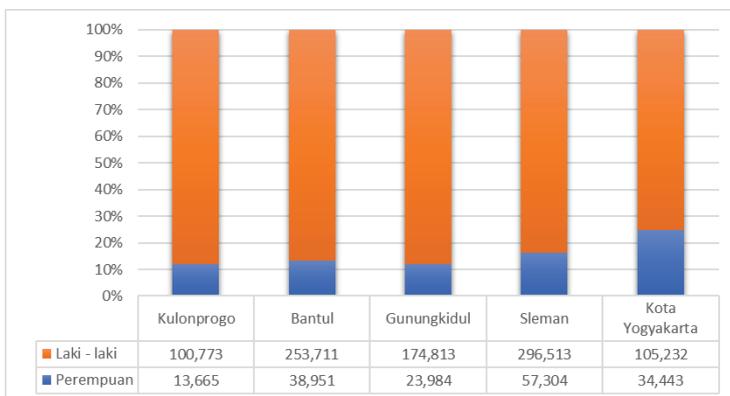
Sumber: BPS, 2022

Gambar 4.1 Piramida Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan grafik piramida penduduk DIY membentuk pola pertumbuhan penduduk ekspansif. Hal ini dikarenakan lebih banyak penduduk berusia produktif ketimbang non produktif, diperkuat dengan asumsi Indonesia mendapatkan bonus demografi tahun 2045.

Lebih lanjut, aspek gender kepala rumah tangga juga menjadi bagian penting di dalam karakteristik rumah tangga. Berbagai studi seperti yang dilakukan oleh Ginther and Juhn, (2015); Lee, (2009); Sugiharti

et al., (2022); Taheri et al., (2021) mengemukakan bahwa kepala rumah tangga perempuan memiliki kecenderungan untuk masuk kedalam zona kemiskinan. Hal ini diperkuat bahwa secara postulat maupun empiris bahwa kesempatan kerja perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki, selain itu para pencari kerja wanita juga memiliki batasan-batasan tertentu dalam mengakses sebuah profesi maupun pekerjaan. Berdasarkan gender, Kabupaten Sleman merupakan wilayah di mana rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga Perempuan.

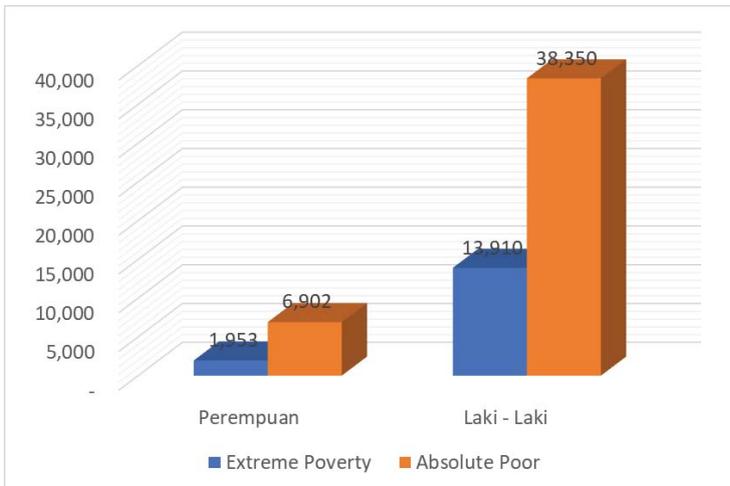


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.2 Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Gender

Berdasarkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan terhitung sebanyak 6.902 rumah tangga

yang termasuk kedalam rumah tangga dibawah garis kemiskinan kabupaten /kota. Sementara berdasarkan *Purchasing Power parity* (PPP) yang termasuk kedalam miskin ekstrim terdapat 1.953 rumah tangga atau sebesar 28% dari total rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan miskin.



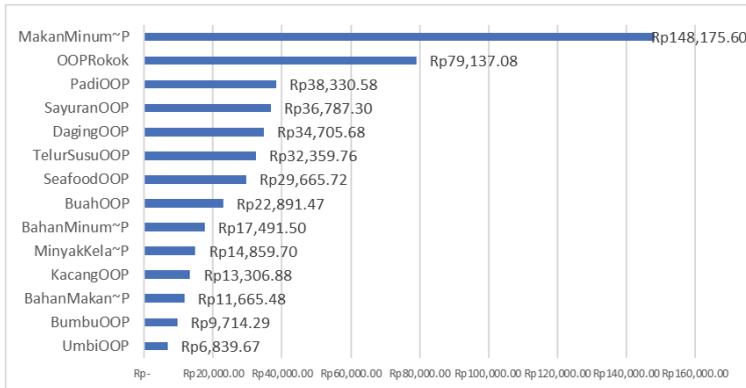
Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Gender

Konsumsi Rumah Tangga

Keterikatan antara rumah tangga dan konsumsi menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Antar rumah tangga yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan karakteristik pada sisi pengeluaran dan penerimaannya. Secara umum, rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga meliputi makanan, pakaian, transportasi, dan jasa lainnya (Eika et al., 2020).

Pengeluaran rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,02 persen. Menurunnya tingkat harga secara umum menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika pengeluaran rumah tangga seperti tingkat pendapatan, akses terhadap nilai kredit perumahan, suku bunga dan kinerja pasar saham (Alp and Seven, 2019).

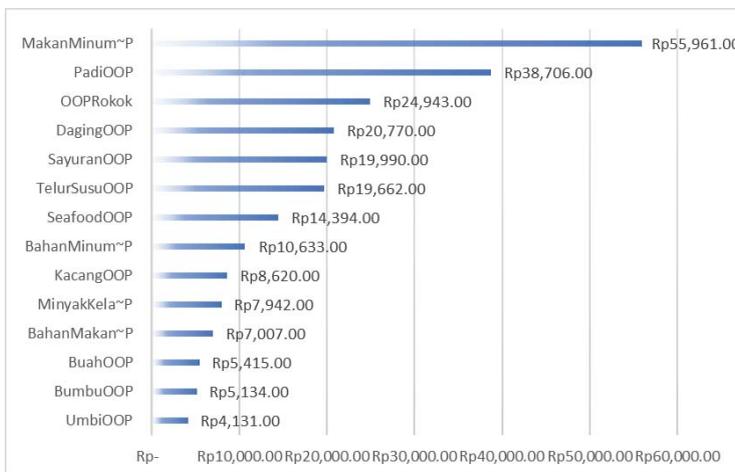


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.4 Rata-Rata Pengeluaran Makanan Rumah Tangga DIY dalam Seminggu Terakhir, Tahun 2022

Konsumsi rumah tangga untuk makanan menjadi bagian yang cukup besar dari pengeluaran dan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok. Makanan merupakan aspek penting dalam pengeluaran rumah tangga (Zezza et al., 2017). Bahkan, sebagian besar pengeluaran rumah tangga digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan. Rata-rata pengeluaran makanan/minuman jadi rumah tangga di DIY selama seminggu terakhir adalah Rp148.175,60. Pengeluaran rokok menjadi pengeluaran paling besar dibandingkan jenis makanan lainnya dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp79.137,08. Kemudian, disusul pengeluaran lainnya yang meliputi pengeluaran padi dengan rata-rata sebesar Rp38.330,58; sayuran

Rp36.787,30; daging Rp34.705,68; telur susu Rp32.359,76; seafood Rp29.665,72; buah Rp22.891,47 dan beragam makanan lainnya.

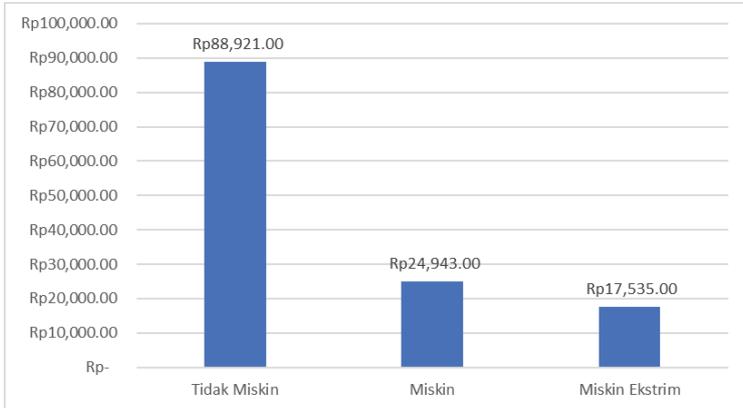


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.5 Konsumsi Rumah Tangga Miskin dalam Seminggu Terakhir, Tahun 2022

Sebagian besar rumah tangga miskin memiliki kecenderungan membelanjakan pengeluarannya untuk makanan (Hymans & Shapiro, 1976). Rata-rata konsumsi makanan dan minuman jadi rumah tangga miskin dalam seminggu terakhir adalah Rp55.961,00. Adapun rata-rata konsumsu untuk kelompok padi-padian sebesar Rp38.706,00. Lebih lanjut, pengeluaran rumah tangga miskin juga digunakan untuk belanja makanan lainnya

seperti rokok Rp24.943,00; daging Rp20.770,00; sayuran Rp19.990,00; telur susu Rp19.662,00; seafood Rp14.394,00; serta jenis makanan lainnya.



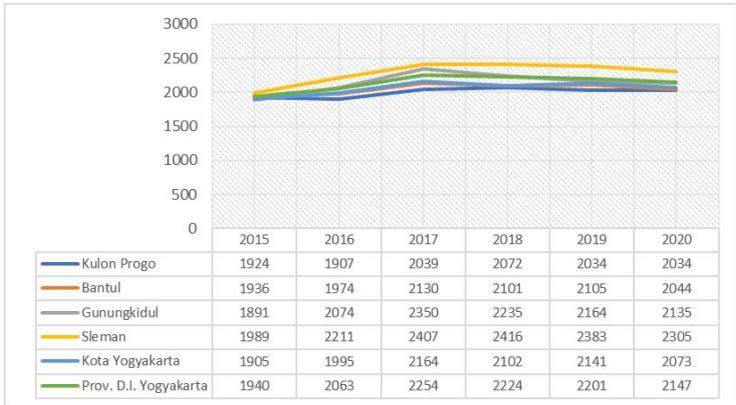
Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.6 Konsumsi Rokok Penduduk DIY Seminggu Terakhir Tahun 2022

Merokok menjadi hal yang umum dilakukan oleh kalangan masyarakat seluruh kelompok sosial ekonomi baik penduduk tidak miskin, miskin, hingga miskin ekstrim mengonsumsi rokok tiap minggunya. Kementerian Kesehatan (2023) menjelaskan bahwa penduduk tidak miskin cenderung lebih banyak menghabiskan uangnya dibandingkan penduduk miskin dalam hal pengeluaran untuk konsumsi rokok. Pada tahun 2022, penduduk tidak miskin di DIY memiliki pengeluaran konsumsi

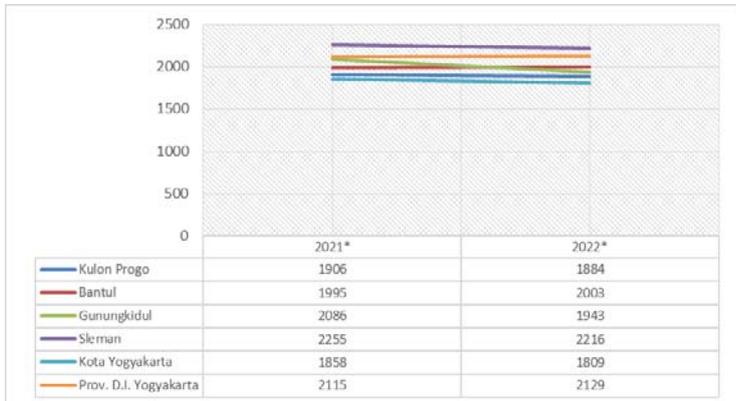
rokok paling besar dalam seminggu yakni Rp88.921,00 sedangkan penduduk miskin Rp24.943,00. Berada dibawah kelompok penduduk lainnya, penduduk miskin ekstrim mengeluarkan biaya konsumsi rokok dalam seminggu sebesar Rp17.535,00.

Lebih lanjut, salah satu instrumen penting sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk menjelaskan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah konsumsi kalori. Almatsier (2000) dan R Imam (2003) mengemukakan bahwa kalori merupakan satuan energi yang dinyatakan dalam unit panas, artinya untuk menghasilkan sebuah energi yang dibutuhkan sehari-hari. Kebutuhan kalori setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan fakto-faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, rata-rata intensitas dari kegiatan yang dilakukan dalam sehari.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 4.7 Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per hari (Kilo Kalori (kkal)) Tahun 2015-2020



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.8 Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per hari (Kilo Kalori (kkal)) Tahun 2021-2022

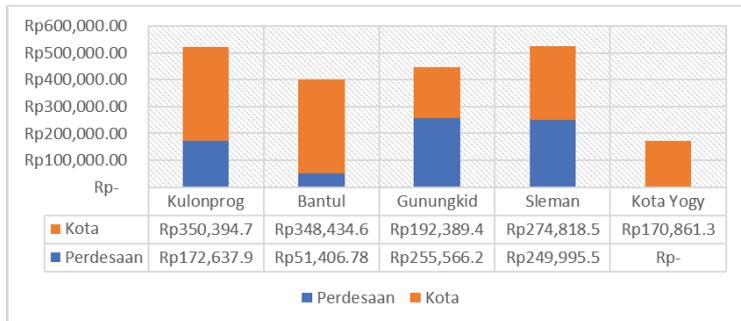
Melansir dari tujuan ketiga pembangunan berkelanjutan United Nation, (2022) mengenai kesehatan dan kesejahteraan (*health and well-being*), konsumsi kalori sekaligus menjadi tolok ukur kesehatan dan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia. Semakin menurunnya konsumsi kalori per kapita maka disinyalir terdapat fenomena kurangnya ketersediaan atau ketahanan pangan (*food security*), akses terhadap bahan pangan yang sehat, dan menurunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh makanan yang sehat.

Pengeluaran Kesehatan Rumah Tangga

Rancangan pembangunan kesehatan menjadi salah satu upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat secara holistik. Lebih tepatnya secara sosial dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dapat dijadikan investasi jangka panjang, karena itu agenda kebijakan kesehatan diperlukan dalam upaya preventif (Hill, 2001).

Pengeluaran kesehatan berpengaruh terhadap beban anggaran belanja pemerintah, namun demikian semakin tinggi beban biaya kesehatan akan berpengaruh terhadap standar dan tatanan kehidupan masyarakat (Awais et al., 2021; Payandeh et al., 2017). Meier dan Stiglitz (2001) mengemukakan bahwa kesehatan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dimana semakin

sehat individu akan semakin produktif, efisien, dan meningkatkan angka harapan hidup.



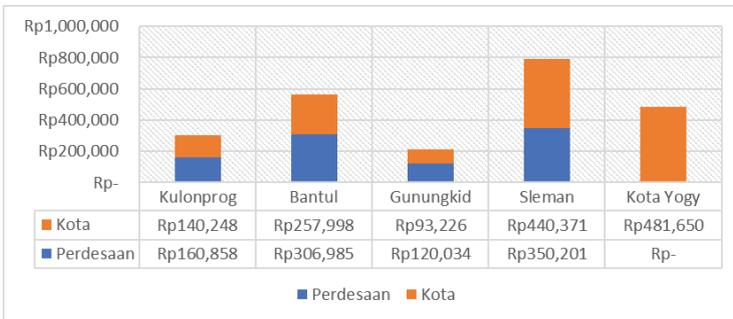
Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.8 Rata - Rata Pengeluaran Kesehatan Mandiri Rumah Tangga DIY selama Sebulan

Pengeluaran kesehatan menjadi bagian dari konsumsi rumah tangga yang bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan memulihkan kesehatan (Mou, 2013). Perbedaan wilayah kota dan perdesaan berpengaruh terhadap besaran nilai uang yang dikeluarkan oleh tiap rumah tangga. Pengeluaran kesehatan merupakan salah satu bentuk kondisi yang memiliki risiko tinggi untuk terjatuh kedalam *catastrophic health expenditure* ketika pengeluaran kesehatan melebihi dari 40% dari kapasitas daya beli rumah tangga.

Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi paling mendasar rumah tangga menengah kebawah dalam merubah atau meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Menurut Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, (2016) bahwa salah satu bukti kesuksesan sejarah umat manusia adalah bagaimana ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, namun pendidikan memiliki peran utama dalam merubah sudut pandang umat manusia dengan melihat sebuah perubahan melalui gambaran secara luas.



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 4.9 Rata-Rata Pengeluaran Pendidikan Mandiri Selama Sebulan

Pendidikan merupakan aspek penting bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas. Untuk memiliki tingkat pendidikan yang kompeten, rumah tangga perlu mengeluarkan biaya secara rutin. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan tertinggi yakni sebesar Rp481.650. Di susul Kabupaten Sleman, masing-masing untuk wilayah perkotaan sebesar Rp440.371 dan perdesaan Rp350.201. Adapun Kabupaten Kulonprogo merupakan wilayah dengan belanja rumah tangga untuk pendidikan yakni Rp140.248 untuk perkotaan dan Rp160.858 untuk perdesaan.

BAB V

PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN DAN PERUMAHAN

Pendidikan

Ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan diduga mempunyai keterkaitan yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan harus diatasi karena dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Bank Dunia, 2016). Hubungan antara ketimpangan pendidikan dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak diteliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai pengaruh ketimpangan pendidikan dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Sijabat, (2013) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan ketimpangan

dalam pencapaian pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga ditemukan pada studi Castelló-Climent (2010), dan Thomas, dkk., (2001). Hasil berbeda ditunjukkan oleh studi Castelló-Climent (2010) dan Rodríguez-Pose, A., & Tselios (2010) pada kasus negara-negara maju di mana ketimpangan pendidikan justru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Studi lain mengungkapkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan nonlinear. Penelitian Yu, dkk. (2015) dan Ziesemer (2016) mengungkapkan bahwa hubungan ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi seperti kurva U. Berbeda dengan penelitian tersebut, Castelló-Climent (2010) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang jelas dalam hubungan ketidakmerataan modal manusia dan pertumbuhan ekonomi di negara maju.

Ketimpangan pendidikan merupakan salah satu jenis ketimpangan yang menjadi isu dalam pembangunan nasional, selain ketimpangan pendapatan dan kesehatan (Todaro & Smith, 2011). Di samping itu, ketimpangan pendidikan dapat melengkapi ukuran kesejahteraan yang sudah ada (Thomas, V., Wang, Y., & Fan, 2001). Tingginya angka ketimpangan pendidikan yang terjadi di suatu daerah menunjukkan jenjang pendidikan tertentu hanya

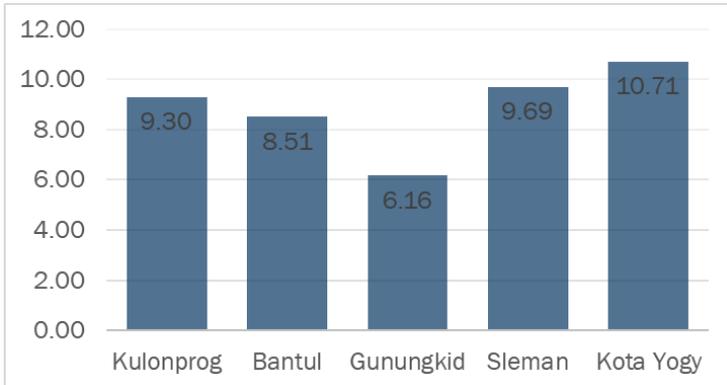
dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat tertentu saja.

Pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), studi oleh Riyadi dkk. (2021) menunjukkan angka ketimpangan pendidikan penduduk di perdesaan pada tahun 2017 mencapai 0,347, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,263. Keterbatasan akses sarana/prasarana pendidikan di perdesaan menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menikmati pendidikan, terlebih lagi bagi penduduk yang kurang mampu. Menurut Vito, B., Krisnani, H., & Resnawaty (2015), beberapa hal yang memengaruhi kesenjangan pendidikan di perdesaan yaitu sulitnya akses menuju sekolah, kualitas sarana dan prasarana sekolah di perdesaan yang belum memadai, dan jumlah guru tenaga pengajar yang belum memadai.

Studi oleh Riyadi dkk. (2021) menyatakan penduduk laki-laki relatif lebih merata capaian pendidikannya dibanding perempuan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Masih banyak penduduk perempuan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan berdiam diri di rumah untuk membantu tugas pekerjaan orang tua (Incing, dkk., 2013). Faktor lain yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yaitu masih terdapat pandangan bahwa perempuan hanya mengurus tugas rumah tangga, dan keselamatan anak perempuan tidak aman jika jauh dari pengawasan orang tua (Incing, dkk., 2013).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Riyadi dkk. (2021) dengan menggunakan data Susenas Kor 2017, daerah 3T memiliki angka ketimpangan pendidikan penduduk laki-laki sebesar 0,305, sedangkan perempuan 0,354 pada tahun 2017.

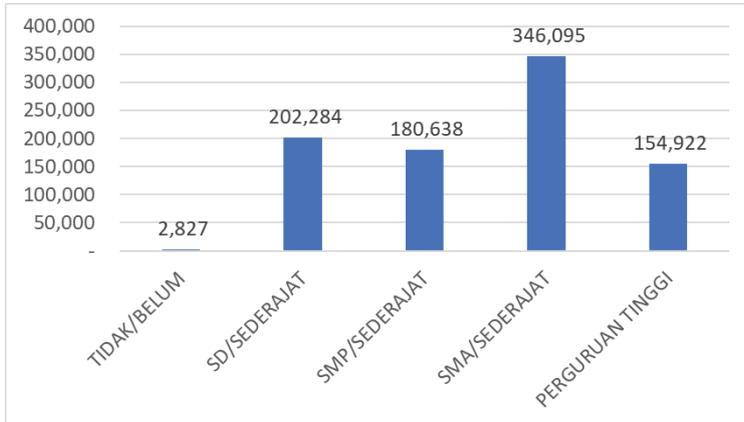
Tingkat pencapaian pendidikan penduduk Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia. Menurut data BPS, masih terdapat penduduk yang hanya menamatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Bahkan, masih terdapat penduduk yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan buta huruf. Dilihat dari sisi distribusi atau pemerataan pencapaian pendidikan yang dihitung menggunakan rasio gini rata-rata lama sekolah, ketimpangan pendidikan penduduk Indonesia selama tahun 2013-2017 antara 0,283 hingga 0,298 dan mengalami kecenderungan yang menurun (Riyadi dkk., 2021).



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 5.1 Rata-Rata Lama Sekolah DIY Tahun 2022

Berdasarkan rata-rata lama sekolah maka Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi yakni 10,71 tahun. Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan rata-rata lama sekolah terendah yakni 6,16 tahun. Lebih lanjut, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka mayoritas kepala rumah tangga lulus SMA/Sederajat.



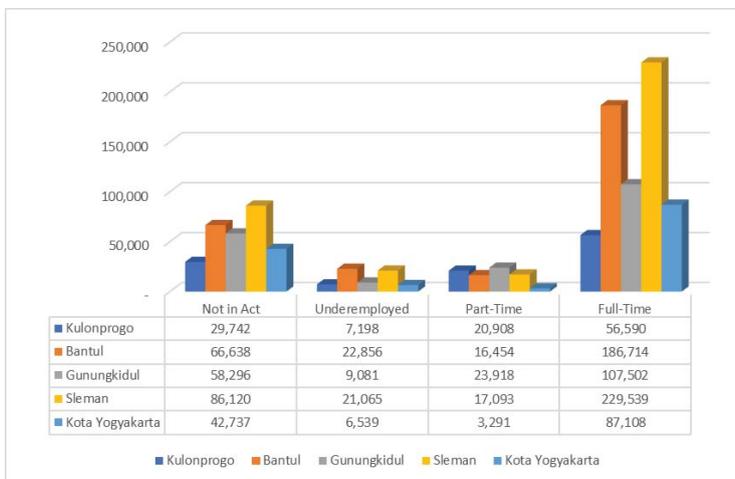
Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 5.2 Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di DIY dapat dianalisis dari jumlah penduduk tahun 2022 masuk kategori *non in act* dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu di Kuloprogo 29.742, Bantul 66.638, Gunungkidul 58.296, Sleman 86.120 dan Kota Yogyakarta 42.737. Kategori *underemployed* dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu di Kuloprogo 7.198, Bantul 22.856, Gungkidul 9.081, Sleman 21.065 dan Kota Yogyakarta 6.539. Kategori Part-Time dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu di Kuloprogo 20.908, Bantul 16.454, Gunungkidul 23.918, Sleman 17.093 dan Kota Yogyakarta 3.291. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui web

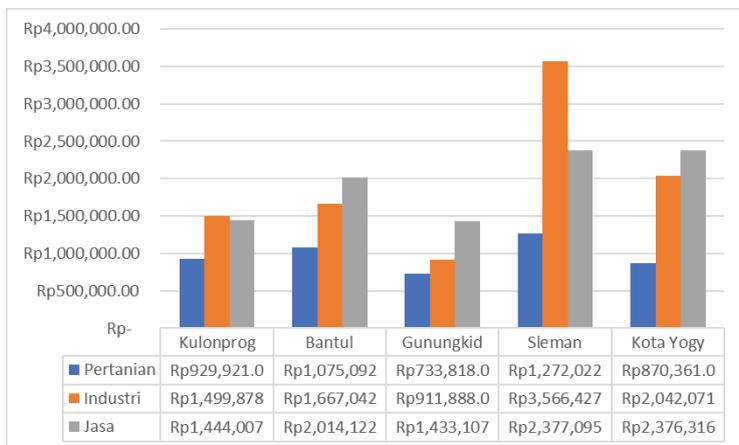
BPS.go.id disimpulkan bahwa masih tingginya tingkat *underemployed* di kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman dalam tahun 2022.



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 5.3 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja DIY Tahun 2022

Berdasarkan jenis sektor usaha penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta disebar menjadi 3 lapangan usaha yaitu sektor pertanian, industri, dan Jasa. Pengeluaran per kapita paling tinggi adalah di sektor industri Kabupaten Sleman sebesar Rp.3.566.427 per bulan, sementara yang paling rendah berada di sektor pertanian di Kota Yogyakarta sebesar Rp.870.361 per bulan.

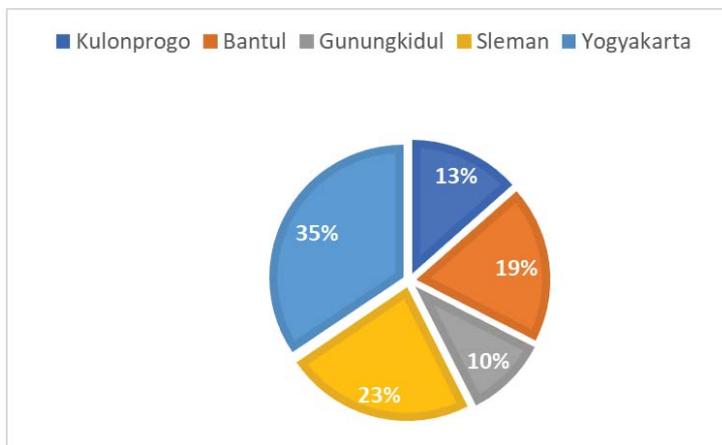


Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 5.4 Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Jenis Sektor Usaha

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase umlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja. Menurut presentasinya angkat TPT paling tinggi adalah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.



Sumber: BPS, 2022

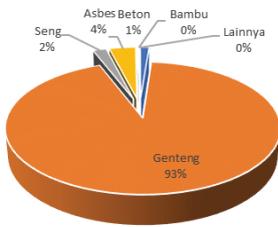
Gambar 5.5 Tingkat pengangguran Terbuka DIY Tahun 2022

Perumahan

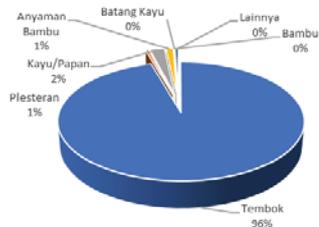
Penyediaan perumahan layak menjadi permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Average, 2019). Permasalahan tersebut terjadi di perkotaan negara-negara berkembang dan terus mengalami peningkatan yang tinggi (Amini, (2016); Ezeh, et al., (2017); Satterthwaite, (2016). Hal tersebut menggambarkan tata aturan dan tata kelola perkotaan yang kurang baik (Chiodelli & Moroni, (2014). Permasalahan semakin kompleks karena sepertiga

penduduk di perkotaan memilih tinggal di tempat tidak layak huni tersebut (Patel, et al., 2014) dan saat ini untuk pertama kalinya penduduk perkotaan memiliki proporsi lebih besar daripada penduduk yang tinggal di pedesaan (Mahabir, et al., 2016).

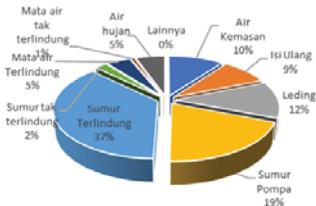
Masyarakat berpenghasilan rendah menghuni permukiman kumuh dengan kualitas perumahan buruk dan fasilitas terbatas (Tanni, et al., 2014). Kondisi di lingkungan ini memiliki akses air terbatas, saluran air dipenuhi sampah, dan tidak manusiawi (Das et al., 2017). Umumnya perumahan kumuh ilegal (Supriatna, A., & van der Molen, 2014) dan menjadi masalah pembangunan perkotaan (Patel, et al., 2012). Pendapatan rendah mendorong masyarakat tetap tinggal demi pemenuhan kebutuhan perumahan (Vasudevan, 2015). Diperlukan pembangunan efektif dan inklusif untuk menangani masalah ini (Abubakar, 2019). Pembangunan inklusif penting untuk melindungi masyarakat miskin di wilayah tersebut (Rachmawati, et al., 2017).



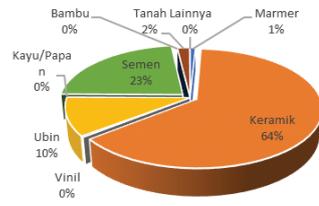
Gambar 5.6a Persentase Kondisi Atap



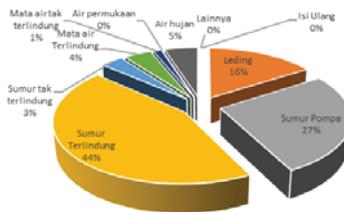
Gambar 5.6b Persentase Kondisi Dinding



Gambar 5.6c Persentase Kondisi Air Minum



Gambar 5.6d Persentase Kondisi Lantai



Gambar 5.6e Persentase Kondisi Mandi Cuci

Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 5.6 Kondisi Perumahan Rumah Tangga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022

Pembangunan perumahan di DIY dan daerah kabupaten/kota sekitarnya berkembang sangat pesat. Kondisi bangunan rumah yang menjadi perhatian pada kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, Kemudian unsur air minum dan mandi cuci merupak dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perumahan. Bangunan perumahan yang beratap cukup banyak beratap genteng 93%, kemudian lainnya beratap seng, beratap Benton. Kondisi dinding dengan dinding tembok 96%, lainnya dinding kayu/papan, plasteran, anyaman bambu dan batang kayu. Kondisi lantai keramik 64%, lainnya, ubin, semen, marmer, tanah. Kondisi atap, kondisi dinding, dan kondisi lantai sebagai tolok ukur untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan masih banyaknya kondisi rumah yang tidak permanen dan semi permanen memberikan gambaran masih besarnya proporsi penduduk yang memiliki akses yang rendah terhadap rumah yang layak. Berikut gambar grafik mengenai kondisi atap, dinding dan lantai perumahan perumahan yang dapat diakses oleh penduduk dengan kondisi sosial ekonomi rendah hingga menengah masih menjadi hal penting.

BAB VI

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Aspek Keuangan dan Perbankan

Berbagai negara menunjukkan bagaimana akses layanan keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Beck, et al., 2000; Levine, 2005). Selain itu, terdapat penelitian yang telah membuktikan bahwa pembangunan keuangan berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui saluran pertumbuhan dan kesetaraan pendapatan (Beck, et al., 2007a). Sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan bergantung pada inklusivitas sistem suatu negara. Dengan kata lain, ketika sistem keuangan inklusif, artinya berbagai layanan keuangan berkualitas dapat diakses oleh orang-orang dengan pendapatan rendah, efek pertumbuhan dari pembangunan keuangan menjadi pro miskin (Bank Dunia, 2014).

Bank Dunia menempatkan penekanan kuat pada peningkatan potensi ekonomi bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan aset. Seperti yang bisa diantisipasi, faktor kunci dalam menentukan ketimpangan pendapatan adalah distribusi awal aset dan pendapatan. Wilayah dengan kesenjangan masyarakat yang relatif kecil mempunyai kesempatan lebih besar untuk keluar dari kondisi kesenjangan. Sebaliknya, kondisi wilayah dengan kesenjangan tinggi cenderung sulit terhindar dari kesenjangan. Kedudukan sosial dan ekonomi awal dapat menentukan pola distribusi. Reformasi tanah, pendidikan massal, dan program-program lain perlu dilaksanakan sehingga pertumbuhan berjalan dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Alesina, 1994; Morawetz, 1974; Nafziger, 1968).

Keuangan mikro adalah strategi yang paling sering digunakan untuk memberantas kemiskinan pada rumah tangga miskin. Hal tersebut berkembang dengan cepat dan luas selama bertahun-tahun dan sekarang ditemukan pada beberapa negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (Banerjee SB, (2017); Lashley, (2004). Banyak akademisi dan politisi percaya bahwa akses ke keuangan mikro di negara-negara berkembang akan memberdayakan yang kurang mampu, terutama perempuan, dengan meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, mendorong kewirausahaan,

dan mengurangi kerentanan. Untuk meningkatkan keberhasilan keuangan mikro, inisiatif harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan sanitasi serta untuk memberikan bantuan teknis, pelatihan pengembangan keterampilan, dan layanan lainnya (Montgomery H, 2011).

Di sejumlah besar negara berkembang, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan investasi publik untuk perlindungan sosial, seperti sistem asuransi sosial dan pembayaran bantuan sosial, terus menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. JPS dan program perlindungan ini menguntungkan negara-negara berkembang dengan mengurangi kemiskinan, tingkat keparahan, kerentanan, dan berbagai ketidakadilan sosial. Laporan Pembangunan Dunia tahun 1990 mengusulkan strategi untuk mengurangi kemiskinan dengan menggabungkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberian layanan sosial mendasar kepada yang kurang mampu serta pembentukan jaring pengaman keuangan dan sosial (World Bank, 1990).

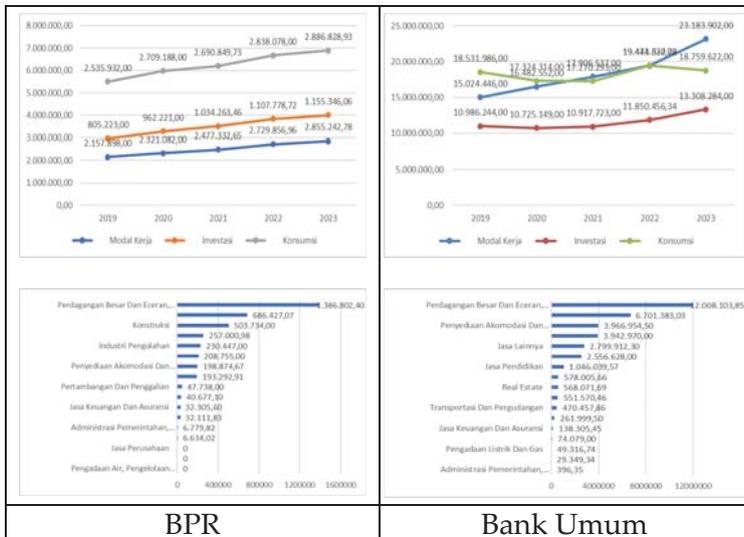
Di negara-negara berkembang, perspektif yang berlaku didasarkan pada gagasan bahwa bank-bank milik pemerintah, termasuk bank-bank pembangunan dan pinjaman bersubsidi memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan (Paul Holden, 2001). Namun, hal ini perlu memiliki daya dukung dari kemampuan masyarakat

dalam melakukan manajemen keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2019, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Adapun indeks literasi keuangan DIY Tahun 2022 sebesar 54,55% dan indeks inklusi keuangan sebesar 82,08%. Adanya kesenjangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan yang relatif tinggi dapat diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan sebuah proses untuk mengukur seberapa dalam hubungan sebuah individu, rumah tangga, atau komunitas bisnis dalam mengakses layanan keuangan seperti kartu kredit, transaksi, pembayaran, tabungan dan asuransi Cicchiello et al., (2021). Hal ini merupakan bentuk implementasi dari pemahaman finansial dalam mengelola keuangan serta memanfaatkan beberapa bentuk pelayanan

keuangan untuk berpartisipasi menjadi roda penggerak perekonomian bahkan memberdayakan sebuah resistensi terhadap fenomena yang tidak dapat terukur (*chaos in order*).

Berdasarkan sumber penggunaan dananya, masyarakat di DIY masih melakukan peminjaman di beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan cenderung melakukan konsumsi ketimbang sebagai modal kerja dan investasi. Seluruh, peminjaman dana meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat diasumsikan bahwa fungsi kredit semakin meningkat berdasarkan faktor permintaan. Berdasarkan data peminjaman di Bank Umum/konvensional dapat diperhatikan aliran dananya lebih tinggi dalam mengakomodasi modal kerja maupun investasi, sementara untuk fungsi konsumsi semakin menurun.



Sumber: Bank Indonesia, 2022

Gambar 6.1 Manfaat Pemijanaan Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara moneter problematika inklusi keuangan merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Shrestha and Nursamsu, 2021). Keterbukaan masyarakat terhadap aksesibilitas layanan keuangan mampu mendukung pengentasan kemiskinan. Semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan keuangan dapat membuka lapangan pekerjaan, akses terhadap Pendidikan, akses terhadap kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan.

Studi oleh Cicchiello et al., (2021); Sambodo et al., (2017); Shrestha & Nursamsu, (2021) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inklusi keuangan, bahwa dengan berkembangnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan dapat mendorong sebuah eksklusi keuangan dan secara natural mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari hubungan korelasi antara inklusi keuangan dan indeks pembangunan manusia.

Program Bantuan Pemerintah

Sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia telah secara aktif mengupayakan inisiatif pengentasan kemiskinan (Nugroho et al., 2021). Kebijakan yang dilakukan dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan atau subsidi pemerintah. Tujuan dari program bantuan sosial adalah untuk menyediakan rumah tangga miskin dengan bantuan finansial langsung dalam jangka pendek sementara serta meningkatkan produktivitas rumah tangga. Pembayaran langsung bantuan sosial dilakukan kepada rumah tangga yang telah diidentifikasi membutuhkannya. Di samping itu, tujuan subsidi semata-mata untuk membantu rumah tangga dalam jangka pendek dengan meningkatkan daya beli rumah tangga.

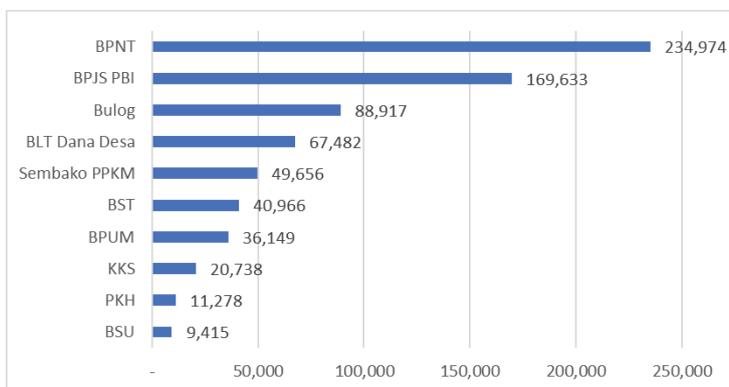


Sumber: BAPPENAS, 2022

Gambar 6.2 Kebijakan Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan tentang tiga kelompok program yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Pemerintah telah menata kembali upaya pengentasan kemiskinan menjadi tiga kelompok yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan inisiatif yang bertujuan

menurunkan tingkat kemiskinan, serta memberikan arah yang berbeda untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah Indonesia meluncurkan skema perlindungan sosial nasional pertama pada masalah kesehatan dan pendidikan, di samping beras bersubsidi dan program *cash-for-work* untuk rumah tangga miskin. Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan rumah tangga miskin di daerah miskin (Suryahadi et al., 2010). Banyak dari jaring pengaman sosial yang dimulai ini masih diterapkan, meskipun dengan beberapa perubahan; beberapa di antaranya dikaji dalam konteks pendekatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang telah muncul dari krisis.



Sumber: SUSENAS, 2022

Gambar 6.3 Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Bantuan Pemerintah

Berdasarkan eksplorasi data SUSENAS Tahun 2022 dapat diidentifikasi bahwa bentuk bantuan pemerintah paling dominan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 234.974 peserta, program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS PBI sebanyak 169.633 peserta, program bantuan Bulog, BLT dana desa, dan program bantuan lainnya. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Tabel 6.1 Simulasi Program BPNT dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022

Program BPNT	Poverty Eradication	Inequality Reduction
Simulasi 1 (Dengan Program BPNT)	0,04%	45,88%
Simulasi 2 (Tanpa Program BPNT)	0,05%	46,40%
Marginal Effect	-0,01%	-0,52%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 6.1 di atas menggambarkan hasil analisis jika rumah tangga miskin menerima program BPNT dan tanpa program BPNT, dengan outcome pengentasan kemiskinan dan mengurangi Ketimpangan pengeluaran (proxy pendapatan). Simulasi pertama merupakan pengeluaran per kapita dengan adanya program BPNT, lalu pada simulasi kedua dilakukan penghitungan pengeluaran per kapita tanpa program BPNT. Berdasarkan hasil analisis, program BPNT secara efisien dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,01%, sementara untuk mengurangi ketimpangan secara efisien sebesar 0,52%.

BAB VII

PENUTUP

Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan diukur melalui dua indikator yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan absolut diukur dari total pendapatan individu, sedangkan kemiskinan ekstrim diukur berdasarkan pemenuhan biaya hidup sehari-hari. Pada tahun 2022, DIY memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,49%. Kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Pada tahun 2022, terdapat 35.169 penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 10.083 rumah tangga miskin di wilayah pedesaan. Selain itu, kemiskinan juga terkait dengan gender. Pada tahun 2022, mayoritas rumah tangga miskin di DIY dipimpin oleh kepala rumah tangga laki-laki.

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim. Pemerintah DIY telah menerapkan kebijakan dengan

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menciptakan berbagai program dengan tujuan mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim. Data kemiskinan ekstrim DIY tahun 2021-2022 menunjukkan kondisi penurunan angka kemiskinan ekstrim pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota DIY.

Ketimpangan pendapatan diukur melalui perbedaan sebaran pendapatan antar rumah tangga. Ketimpangan pendapatan di DIY diukur melalui Gini ratio yang berkisar antara 0,3 hingga 0,4, menunjukkan tingkat ketimpangan kategori sedang. Namun, pada tahun 2022, Kota Yogyakarta mengalami lonjakan ketimpangan yang cukup jauh dengan kabupaten lainnya dengan Gini ratio sebesar 0,52. Ketimpangan pendapatan juga dapat dinilai melalui aspek pengeluaran. Data SUSENAS menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di DIY. Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan kedua Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan ekstrim lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya selama tahun 2021 hingga 2022.

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat. Ketimpangan pendapatan dapat memperburuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena berbagai kondisi yang mencerminkan perbedaan pendapatan antar rumah

tangga. Ketidakmerataan persebaran pendapatan menjadi tantangan dalam membangun perekonomian. Ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi merugikan daerah secara berkelanjutan. Terjadinya kondisi tersebut berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi penduduk berpendapatan rendah. Disisi lain, penduduk berpendapatan tinggi mampu memperoleh seluruh fasilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diatasi dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan untuk memacu pembangunan ekonomi daerah.

Kondisi ketimpangan dan kemiskinan di DIY dapat diatasi dengan berbagai upaya, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, memperbaiki infrastruktur, dan menerapkan kebijakan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan menciptakan berbagai program dengan tujuan mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim. Dalam jangka panjang, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Alesina, A. and D.R., (1994). Distributive Politics and Economic Growth. QJE 109 465–490.
- Alp, E., Seven, Ü., (2019). The dynamics of household final consumption: The role of wealth channel. Cent. Bank Rev. 19, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.03.002>
- Amini, E., (2016). An Analysis on Physical-Environmental Quality of Informal Settlements and its Role in The Vitality of Citizens, Case Study: Informal Settlement of Qom City, Sheikhabad Neighborhood. Turkish Online J. Des. Art Commun. - TOJDAC.

- Average, C., (2019). Low Income Housing Problems and Low Income Housing Solutions: Opportunities and Challenges in Bulawayo. *J. Hous. Built* Vol. 34, 927–938.
- Badan Pusat Statistik (BPS), n.d. Konsumsi dan Pengeluaran [WWW Document]. URL <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>
- Banerjee SB, J.L., (2017). Micro-finance and the business of poverty reduction: critical perspectives from rural Bangladesh. *Hum. Relations* 70(1), 63–91.
- Bank Dunia, (2014). Global Financial Development Report: Financial Inclusion. World Bank. 2014.
- Bank Dunia, (2016). Ketimpangan yang semakin lebar.
- Bank, A.D., (2012). Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia: India, *Foreign Trade Review*. <https://doi.org/10.1177/0015732515120105>
- Bazillier, R., Héricourt, J., Ligonnière, S., (2021). Structure of income inequality and household leverage : Cross-country causal evidence *R. Eur. Econ. Rev.* 132, 103629. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103629>

- Beck, T., A. Demirgüç-Kunt, and R.L., (2007). Finance, Inequality, and the Poor. *J. Econ. Growth* 12 (1), 27–49.
- Beck, T., A. Demirgüç-Kunt, and V.M., (2005). Financial and Legal Constraints to Firm Growth: Does Firm Size Matter? *J. Finance* 60 (1), 137–177.
- Beck, T., R. Livine, and N.L., (2000). Finance and the Sources of Growth. *J. financ. econ.* 58, 261–300.
- Cahyadi, R.& G.A., (2009). Penduduk Dan Pembangunan Perumahan Di Jabodetabek : Tantangan Pengembangan Megapolitan Jakarta. PPK Lemb. Ilmu Pengetahuan Indones. IV, 55–72.
- Castelló-Climent, A., (2010). Inequality and growth in advanced economies: An empirical investigation. *J. Econ. Inequal.* 8 (3), 293–321.
- Chiodelli, F., & Moroni, S., (2014). The complex nexus between informality and the law: Reconsidering unauthorised settlements in light of the concept of nomotropism. *Geoforum* 51, 161–168.
- Eika, L., Mogstad, M., Vestad, O.L., (2020). What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets? *J. Public*

- Econ. 189, 104163. <https://doi.org/10.1016/j.jpubecon.2020.104163>
- Ezeh, A., Oyebode, O., S., D., Chen, Y.-F., Ndugwa, R., Satori, J., . . . Lilford, R., (2017). The history, geography, and sociology of slums and the health problems of people who live in slums.
- Hananda, R., (2016). Pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur [Skripsi]. Universitas Airlangga.
- Heryanah, (2017). KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA: STUDI EMPIRIS BERDASARKAN SUSENAS 2008, 2011 DAN 2013. *Junral BPPK* 10, 43–58.
- Hymans, S.H., Shapiro, H.T., (1976). The allocation of household income to food consumption. *J. Econom.* 4, 167–188. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(76\)90011-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(76)90011-7)
- Incing, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S., (2013). Kesenjangan gender (perempuan) dalam mendapatkan pendidikan pada masyarakat pedesaan. *JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.* 2(1), 38–40.

- Kementerian Kesehatan, (2023). Konsumsi Rokok Menyumbang Kemiskinan di Indonesia [WWW Document]. URL https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2066/konsumsi-rokok-menyumbang-kemiskinan-di-indonesia
- Khan, S., Yahong, W., Zeeshan, A., (2022). Impact of poverty and income inequality on the ecological footprint in Asian developing economies : Assessment of Sustainable Development Goals. *Energy Reports* 8, 670–679. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.12.001>
- Lashley, J., (2004). Micro-finance and poverty alleviation in the Caribbean: a strategic overview. *J. Microfinance* 6(1), 83–94.
- Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P., (2016). The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities. *Reg. Stud. Reg. Sci.* 399–419.
- Maryanti, S.& H., (2016). Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. *Pekbis J.* 8, 83–96.

- Matlin, A., Walmsley, D., (2010). Some are more equal than others. *Br. Dent. J.* 209, 261. <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2010.820>
- Montgomery H, W.J., (2011). Can commercially-oriented microfinance help meet the millennium development goals? Evidence from Pakistan. *World Dev. Perspect.* 39 (1), 87–109.
- Morawetz, D., (1974). *Employment Implications of Industrialization in Developing Countries.*
- Mou, H., (2013). The political economy of the public-private mix in health expenditure: An empirical review of thirteen OECD countries. *Health Policy (New. York).* 113, 270–283. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.07.004>
- Nafziger, E.W., (2006). *Economic Development, FOURTH EDITION.*
- Nafziger, E.W., (1968). A Reconsideration of ‘Capital Surplus’ in Nigeria. *Niger. J. Econ. Soc. Stud.* 10(1), 111–116.
- Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schafft, A., Rademacher, and S.K.S., (2000). *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* OUP, New York:

- Nugraha, A.T., Prayitno, G., Nandhiko, L., Nasution, A.R., (2021). Socioeconomic conditions on poverty levels a case study: Central Java Province and Yogyakarta in 2016. *Rev. Econ. e Sociol. Rural* 60, 1–13. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.233206>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., Marlina, I., (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *J. Policy Model.* 43, 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Nur, F., (2018). Analisis ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Patel, A., Koizumi, N., & Crooks, A., (2014). Measuring slum severity in Mumbai and Kolkata: A household-based approach. *Habitat Int.* 41, 300–306.
- Ravallion, Martin, Gaurav Datt, and D. van de W., (1991). Quantifying Absolute Poverty in the Developing World. *Rev. Income Wealth* 37, 345–361.
- Riyadi Riyadi, D.G., (2021). KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN

SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH
TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR
(3T). J. Kependud. Indones.

- Rodríguez-Pose, A., & Tselios, V., (2010). Inequalities in income and education and regional economic growth in western Europe 44 (2), 349–375.
- Saleh, S., (2002). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. J. Ekon. Pembang. 7, 87–102.
- Satterthwaite, D., (2016). "Finding a place in the city; low-income housing sub-markets revisited. Rethink. Precarious Neighb. Work. Paths Interv.
- Sijabat, S.R., (2013). Analisis ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2010 (Tesis).
- Singh, P.K., Chudasama, H., (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. PLoS One 15, 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Sjafrizal, (2012). Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Sjafrizal, (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*.
Baduose Media, Padang.
- SMERU, (2016). *Menilai Dampak Ketimpangan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di
Indonesia*.
- SMERU, (2005). *Apakah Gender Mempengaruhi
Ketidakhadiran Pekerja? Kasus Pemberi Layanan
Kesehatan dan pendidikan di Indonesia Does
Gender Affect Absenteeism? The Case of Basic
Health and Education Providers in Indonesia*.
SMERU Newsl. 14, 11–15.
- Sugiyarto, S., Mulyo, J.H., Seleky, R.N., (2016). *Kemiskinan
Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga
Di Kabupaten Bojonegoro*. *Agro Ekon.* 26, 115.
<https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Suryahadi, A., Yumna, A., Raya, U.R., Marbun, D., (2010).
*Review of Government's Poverty Reduction
Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*.
Res. Report, SMERU Res. Inst. 1–43.
- Tanni, T. T., Hasan, M. J., Azad, A.K., & Bakali, B., (2014).
*State of the Environment in Slum Area: A Case
Study on Khora Slum, Khulna*. *J. Environ. Sci. &
Natural Resources* 7(1), 295–304.

- Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X., (2001). Measuring education inequality: Gini coefficients of education (Policy Research Working Paper No. 2525).
- Todaro, M. P., & Smith, S.C., (2011). Pembangunan Ekonomi (Edisi ke-11). Erlangga.
- Vito, B., Krisnani, H., & Resnawaty, R., (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. Prosiding KS: Riset dan PKM 2(2), 247–251.
- Wibowo, T., (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. Kaji. Ekon. dan Keuang. 20, 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>
- World Bank, (1990). World Development Report 1990: Poverty. Oxford University Press; New York, Washington, DC, USA.
- Yu, N., Yu, B., de Jong, M., & Storm, S., (2015). Does inequality in educational attainment matter for China's economic growth? Int. J. Educ. Dev. 41, 164–173.
- Zeza, A., Carletto, C., Fiedler, J.L., Gennari, P., Jolliffe, D., (2017). Food counts. Measuring food consumption and expenditures in household consumption and expenditure surveys (HCES).

Introduction to the special issue. *Food Policy* 72, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.08.007>

Zieseemer, T., (2016). Gini coefficients of education for 146 countries, 1950-2010. *Bull. Appl. Econ.* 3(2), 1–8.

Zieseemer, T., (2016). Gini Coefficients of Education for 146 Countries , GH15cd. *Bull. Appl. Econ.* 3, 1–8.